

**POLITIK PADI PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDRAMAYU  
TAHUN 1942-1944**

**GRITA ANGGRAINI**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
E-Mail : [gritaanggraini123@gmail.com](mailto:gritaanggraini123@gmail.com)

**Artono**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Politik padi yang dilaksanakan pemerintah Jepang adalah penyerahan padi yang ditujukan untuk kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah Jepang. Kepentingan tersebut, yaitu keinginan untuk mencapai kemenangan atas perang Asia Timur Raya. Dalam usahanya untuk mencapai tujuannya, pemerintah Jepang memasukkan Indonesia sebagai bagian dari rencana dalam penguasaan terhadap wilayah Asia tenggara. Pemerintah Jepang berusaha untuk semaksimal mungkin memobilisasi rakyat Indonesia demi kepentingan negaranya sendiri.

Indramayu adalah salah satu kota yang dianggap oleh Jepang sebagai kota yang penting. Hal ini dikarenakan Indramayu adalah kota penyuplai beras tertinggi di wilayah Jawa Timur. Bahkan pemerintah Jepang menyebut wilayah Indramayu sebagai Gudang Beras, yang tentunya beras adalah salah satu kebutuhan pokok militer. Hal itulah yang memberikan ketertarikan penulis untuk mengkajinya lebih dalam mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang dalam mengeksploitasi beras di Indramayu.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis latar belakang pemerintah Jepang melaksanakan politik padi. (2) Untuk menganalisis implementasi kebijakan penyerahan padi melalui politik padi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang terhadap petani di Indramayu, (3) untuk menganalisis mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh para petani Indramayu yang berkaitan dengan penolakan pelaksanaan kebijakan politik padi. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sejarah (*historical approach*), yang meliputi empat tahapan proses yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyerahan padi dari para petani ini membawa dampak negatif dan dampak positif yang mngiringinya. Dampak negatif dari kebijakan ini ialah para petani terutama hidup sengsara dan menderita karena adanya kebijakan yang merampas hak-hak mereka dimana hasil dari sawah yang mereka rawat harus diserahkan kepada pemerintah tanpa bisa dinikmati terlebih dahulu oleh para petani. Dampak positif dari kebijakan ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan berkaitan dengan pertanian, dimana sebelum adanya kebijakan penyerahan padi ini, para petani menanam padi dengan cara yang masih primitive. Namun setelah adanya kebijakan dan penelitian, petani menjadi lebih modern dalam melakukan penanaman padi.

**Kata Kunci: Politik, Padi, Indramayu**

**Abstract**

*The politics of rice which is held by Japanese government for the interests Japanese government business. The Japanese objective is the desire to achieve victory over the greater east asia war. Its efforts to achieve these objectives, the government of Japan to include Indonesia as part of a plan in the control of the east asian region. The Japanese government seeks to mobilize the people of Indonesia as much possible for their own country profit. Indramayu is one of the cities that are considered as an important city by Japan. It cause of Indramayu rice supplies is the highest city in east java. Event the Japanese government called the region Indramayu as warehouse of rice. This subject interact the author's for studying more about the policies of the Japanese government in exploiting rice in Indramayu.*

The purpose of this study were (1) To explain the background of the Japanese government to implement political exclusion of rice. (2) To describe the delivery of policy implementation through political of rice issued by the Japanese government to farmers in Indramayu, (3) to explain the revolt by farmers Indramayu relating to the refusal of political policy implementation rice. The method used is the method of approach to history (historical approach), which includes four stages of the process that is heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the policy of submission of rice from these farmers have a negative impact and positive impact. The negative impact of this policy was the farmers, life of misery and suffering for their policies that deprive their rights which results from their fields must be submitted to the government without being able to be enjoyed first by the farmers. The positive impact of this policy is the development of knowledge relating to agriculture, just because the submission policy of rice, farmers plant rice in way primitive. However, after the policy and research, farmers have become more modern in planting rice.

**Keyword: Politics, Rice, Indramayu**

## PENDAHULUAN

Perang Asia Timur Raya diawali dengan penyerbuan Pearl Harbour, 7 Desember 1941, yang berada di lautan pasifik. Dalam perang tersebut, Jepang lebih memfokuskan usahanya untuk menguasai Asia Pasifik sebagai sasaran utamanya yang akan dijadikan *Lebensraum* (*Living Space*) lahan kehidupannya. Untuk memenuhi tujuan itu Kekaisaran Jepang harus berhadapan dengan Amerika Serikat di wilayah koloni Filipina, Perancis penjajah Indo China, Inggris di Singapura, Belanda di Indonesia, serta China yang ingin dikuasainya<sup>1</sup>. Setelah penyerangan terhadap Pearl Harbour, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt menandatangani pernyataan perang terhadap Jepang, yang diikuti oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starckenborgh<sup>2</sup>. Pernyataan ini melibatkan Indonesia dalam perang melawan Jepang. Sebelumnya Indonesia direncanakan menjadi sasaran serbuan Jepang, sesuai dengan “Rencana Tentatif bagi Suatu Kebijaksanaan Daerah-daerah Selatan” karena Indonesia dianggap sebagai sumber bahan strategis terutama minyak dan karet yang harus dikuasai oleh Jepang<sup>3</sup>. Dalam usaha untuk memenangkan Asia Timur Raya, Jepang membutuhkan banyak sekali kebutuhan perang termasuk didalamnya barang-barang logistik yang pada saat itu kebutuhan logistik yang dimiliki Jepang untuk perang masih sangat kurang.

Pada 8 Maret 1942 Jepang berhasil menaklukkan pemerintah Belanda dan menduduki Jawa. Pada awal kedatangannya Jepang menyampaikan tujuannya untuk datang ke Indonesia adalah untuk membebaskan penduduk pribumi dari cengkeraman tangan penjajah Belanda, tidak lupa diikuti dengan propaganda secara intensif melalui radio gelombang pendek yang menggugah rasa kebangsaan orang Indonesia<sup>4</sup>. Oleh karena itu, pada awal mula penyerbuan Jepang reaksi para penduduk pribumi tidak begitu buruk, bahkan menyambut kedatangan Jepang. Namun secara perlahan anggapan ini pun lenyap karena tidak lama setelah kedatangannya, Jepang langsung menerapkan kebijakannya yang bertujuan untuk mengeksploitasi ekonomi secara intensif dan mengendalikan kehidupan rakyat dengan cukup ketat. Tugas pemerintah Jepang yang pertama adalah menyapu bersih pasukan-pasukan Belanda dan sekutu serta pengambilalihan pemerintahan, menghentikan revolusi-revolusi yang mengancam proses penaklukan, serta memusnahkan pengaruh barat<sup>5</sup>.

Selain itu kebijakan-kebijakan Jepang terhadap masyarakat pribumi juga bertujuan untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan manusia guna mendukung operasi militer Jepang. Oleh karena itu, produksi dan distribusi panen, serta bahan komoditas ditempatkan di bawah kontrol pemerintah, dengan prioritas pasokan diberikan untuk pasukan militer. Untuk mempermudah kontrol terhadap negeri-negeri yang dijajah, Jepang membaginya atas negara

<sup>1</sup> Suryanegara, *Api Sejarah*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), hlm. 11

<sup>2</sup> Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>4</sup> Kurasawa, *Kuasa Jepang di Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015), hlm. xlviii

<sup>5</sup> M.C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2007), hlm. 298-301

surplus dan negara minus dalam pengadaan beras.<sup>6</sup>

Dalam melancarkan kebijakan ini, kerja sama dengan seluruh rakyat merupakan hal yang pokok. Pemerintah militer Jepang membuat berbagai program untuk menarik dukungan dari rakyat, sekaligus membentuk pemikiran dan tingkah laku mereka. Berbagai media propaganda digunakan, dan program-program “latihan” dijalankan melalui berbagai kelompok yang dibentuk masyarakat kelas bawah.

Pada masa pendudukan Jepang, Indramayu ditetapkan sebagai pemasok beras untuk pulau-pulau diluar Jawa serta untuk keperluan medan pertempuran di Pasifik Selatan. Indramayu dipilih sebagai pemasok utama beras karena Indramayu merupakan salah satu daerah penanaman padi yang paling penting dan disebut sebagai Gudang Beras Jawa, sebanyak 55% luas wilayahnya merupakan sawah. Beras yang dihasilkan Indramayu banyak diminati oleh Jepang karena dikenal bermutu tinggi dan lebih enak dibanding dengan beras berbutir panjang yang dihasilkan didaratan Asia Tenggara<sup>7</sup>. Didukung dengan tanah yang subur dan iklim tropis, tanaman padi mudah untuk ditanam serta mampu menghasilkan beras yang berkualitas. Beras yang didatangkan dari Indramayu menjadi semakin penting karena semasa perang angkutan jarak jauh dan perkapalan sangat sulit serta keamanan di laut memburuk. Jepang berniat memprioritaskan Pulau Jawa guna memenuhi kebutuhan akan beras. Dalam rangka pelaksanaannya Jawa sebagai bagian dari lingkungan bersama Asia Timur Raya mengemban dua tugas. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan. Kedua, mengusahakan produksi bahan makanan untuk kepentingan perang. Harta yang diminta Jepang bukan hanya beras, tapi juga ternak. Dengan alasan untuk kepentingan perang Jepang, tiga perempat jumlah ternak yang dimiliki penduduk harus diserahkan pemerintah Jepang, dan apabila hal itu tidak dilakukan maka Jepang akan melakukan penyitaan.<sup>8</sup>

Jaman penjajahan Jepang di Kabupaten Indramayu rakyat diwajibkan melaksanakan “wajib setor beras” ini juga biasa disebut “*Zaman Kuintalan*”, karena berasal dari kata *Quintaal*,

yang berarti 100 Kg (satuan berat yang diperkenalkan oleh Jepang). Para petani juga menyebut jaman ini sebagai jaman penyeteroran padi. Masyarakat diwajibkan untuk menyeterorkan sejumlah padi sebanyak yang telah ditentukan pemerintah pendudukan dalam rangka mencukupi kebutuhan untuk perang.

Semua kebijakan Jepang itu merupakan strategi politik Jepang untuk menghasilkan nilai budaya dan kepercayaan yang baru. Namun, mengakibatkan masyarakat mengalami kegoncangan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Eksploitasi sumber daya ekonomi menyebabkan meratanya kemiskinan secara luar biasa, perekrutan tenaga kerja pedesaan sebagai *rômusha* mengakibatkan terganggunya kegiatan pertanian, jarak antara berbagai kelompok sosial semakin tajam, dan gengsi kelas penguasa tradisional sungguh-sungguh digerogeti.

Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia II membawa banyak dampak negatif di berbagai negara didunia. Perang Asia Timur Raya juga memutuskan kontak niaga dengan negara lain. Praktis, kebutuhan ekonomi rakyat tidak terpenuhi baik dibidang sandang maupun pangan. Dibidang pangan berdampak pada terjadinya kelaparan. Dibidang kebutuhan sandang, menjadikan rakyat menjadi sangat menderita, compang-camping. Kekurangannya kebutuhan sandang digantikan dengan bahan karet dan karung goni sebagai busananya.

Berangkat dari fakta tersebut penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana kebijakan Jepang dalam memobilisasi perekonomian di Indonesia untuk kepentingan Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya yang meski pada akhirnya mengalami kekalahan pada peperangan tersebut. Indramayu dipilih penulis sebagai tempat penelitian karena kabupaten ini sebagai Gudang Beras Jawa, kemudian pada kebijakan yang sudah diterapkan, petani Indramayu ditugaskan menyerahkan padinya sebanyak tiga atau empat kali lebih banyak daripada kabupaten lain. Serta Indramayu merupakan satu-satunya Kabupaten di Pulau Jawa dimana pada masa pendudukan Jepang terjadi pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh para petani yang menolak adanya kebijakan pengumpulan padi. Hal ini menurut

<sup>6</sup> Capt.R.P.Suyono, *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial*, (Jakarta:Gramedia,2005), hlm.313

<sup>7</sup> Kurasawa, *op.cit.* hlm. 30

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 311-312

penulis menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai penyerahan padi di Indramayu. Diawali dengan apakah yang melatarbelakangi pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan pengumpulan padi, Kemudian bagaimana implementasi kebijakan tersebut kepada para petani, serta bagaimana resistensi para petani di Indramayu pada saat itu ketika suatu kebijakan memaksa mereka untuk menyerahkan harta dan hasil sawah mereka

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang tidak jauh beda dengan metode penelitian sejarah lainnya, yakni<sup>9</sup> :

1. Heuristik (Yunani: *heureskein-to find*, menemukan), yaitu proses mencari dan menemukan sumber-sumber data yang diperlukan. Dasar penggunaan sumber sejarah ialah keinginan untuk mencari kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi<sup>10</sup>. Dalam pengumpulan sumber, penulis banyak mendatangi perpustakaan di Surabaya, Blitar, juga perpustakaan Nasional di Jakarta. Pengumpulan sumber tidak hanya untuk menemukan sumber primer, tetapi juga sumber sekunder. Sumber primer yang saya dapatkan untuk sampai saat ini berupa surat kabar, majalah dan sumber visual berupa foto. Sedangkan sumber sekunder yang penulis peroleh saat ini sebagian besar adalah buku.
2. Kritik (pengujian) dibedakan menjadi dua yakni kritik intern dan kritik ekstern. Tujuan dari kritik adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kritik intern. Kritik intern lebih menekankan pada isi sumber atau dokumen, sedangkan kritik ekstern lebih kepada keoriginalitas bahan yang dipakai membuat dokumen<sup>11</sup>. Kritik yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Kritik intern, yakni memandingkan kesesuaian sumber satu dengan sumber yang lain. Dengan menggunakan kritik intern, dapat dilihat sumber tersebut dapat

digunakan sebagai sumber untuk penulisan penelitian atau tidak.

3. Interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini interpretasi sejarawan mencari saling hubung antar berbagai fakta yang telah ditemukan kemudian menafsirkannya. Moh Ali menegaskan bahwa fakta dalam sejarah merupakan kerangka, maka daging, daging, otot, darah, dan ruh atau jiwanya adalah penafsiran terhadap fakta tersebut<sup>12</sup>. Garraghan mengemukakan bahwa interpretasi merupakan salah satu langkah yang paling esensi dalam metode sejarah, tanpa penafsiran, penjelasan, fakta-fakta masa silam hanya menjadi kronik, annual, atau catatan-catatan peristiwa<sup>13</sup>. Berbekal dari sumber-sumber sejarah yang telah penulis kumpulkan, penulis berusaha melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah tersebut.
4. Historiografi, yaitu tahap penulisan (*graphiein-tulisan*) sejarah. Langkah selanjutnya setelah melakukan penafsiran yakni penulisan atas fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan, kemudian disajikan secara tertulis sebagai kisah atau ceritera sejarah<sup>14</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebutuhan Ekonomi perang

Angkatan Darat ke-16 Jepang berhasil menaklukkan Belanda dan menduduki Jawa untuk pertama kalinya pada 8 Maret 1942 setelah operasi militer yang dilakukan selama seminggu<sup>15</sup>. Pada awal kedatangannya, tentara Jepang mendapat sambutan yang baik dari rakyat pribumi, karena menjelang penyerbuannya ke Jawa, Jepang sudah memproklamkan tujuan kedatangannya ke Indonesia melalui radio gelombang pendek. Jepang menyatakan bahwa tujuannya ke Indonesia adalah untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Langkah awal yang diambil yang diambil adalah Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga bagian, dimana Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, sedangkan Jawa dan

<sup>9</sup> Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: UNESA University press, 2011), hlm. 10

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>12</sup> R.Moh Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Djakarta : Bratara, 1961), hlm. 22-23

<sup>13</sup> Kasdi, *loc.cit*, hlm. 11

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>15</sup> Kurasawa, *Kuasa Jepang di Jawa*, (Depok : Komunitas Bambu), hlm. xlviii

Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16, kedua wilayah ini berada dibawah Angkatan Darat wilayah ke-7 dengan markas besarnya berada di Singapura<sup>16</sup>. Kebijakan yang diterapkan ditiap-tiap daerah berbeda. Pada umumnya Jawa dianggap daerah yang secara politik dianggap maju namun secara ekonomi kurang penting, sumber daya yang paling diutamakan di Jawa adalah sumber daya manusia.

Salah satu tugas pertama Jepang di Indonesia setelah melakukan pendaratan adalah menghentikan revolusi-revolusi yang mengancam akan menyertai upaya penaklukan mereka<sup>17</sup>. Tujuan utama Jepang adalah menyusun kembali dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencana bagi dominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara<sup>18</sup>.

Kebijakan-kebijakan memiliki memiliki dua prioritas, yakni menghapus pengaruh barat dan memobilisasi rakyat pribumi demi memenangkan perang. Langkah-langkah yang di ambil untuk menghapus pengaruh barat adalah pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan mengutamakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Pelarangan terhadap buku-buku yang berbahasa Belanda dan Inggris juga dilarang. Sebaliknya, masyarakat pribumi di perkenalkan dengan kalender Jepang untuk kepentingan resmi, patung-patung Eropa diruntuhkan, nama jalan di ganti dan Batavia berubah lagi menjadi Jakarta<sup>19</sup>.

Dalam usahanya untuk memenangkan perang Asia Timur Raya, Jepang memerlukan banyak bantuan dari bangsa Indonesia, baik dari segi sumber daya alam maupun manusia. Kajian penelitian ini akan berfokus pada eksploitasi sumber daya alam di Jawa, Indramayu khususnya oleh pemerintah Jepang guna kepentingan pemerintahan Jepang sendiri dan kemenangan perang Asia Timur Raya.

Dalam hal ini, pemerintah Jepang memanfaatkan wilayah Indonesia yang subur untuk melakukan eksploitasi bersa-besaran guna memenuhi kebutuhan logistik terutama beras

untuk menunjang kemenangan dalam perang melawan sekutu. Menurut Suryohadiprojo<sup>20</sup> Logistik merupakan bagian dari strategi, operasi dan taktik, dimana logistik tidak lagi sekedar membutuhkan banyak uang tapi juga harus memperhatikan tersedia barang-barang yang tepat, dalam jumlah yang tepat, ditempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan diberikan kepada orang-orang yang tepat, sesuai dengan strategi, operasi, dan taktik yang dijalankan. Hal itu memerlukan berjalannya satu proses yang tidak sederhana bahkan tidak mustahil dan mengherankan kalau justru strategi, operasi, dan taktik harus menyesuaikan diri pada logistik kalau ingin mencapai hasil yang positif. Masih dalam buku yang sama juga dijelaskan mengenai logistik produksi, dimana logistik produksi meliputi semua usaha dan kegiatan produksi yang bersangkutan dengan penyediaan barang dan bahan yang diperlukan organisasi militer. Hampir tidak ada barang yang diperlukan masyarakat yang tidak diperlukan oleh organisasi militer, terutama bahan dan barang konsumsi. Kemudian juga disertakan mengenai konsumsi logistik yang meliputi kegiatan perbekalan, angkutan, pemeliharaan, pembuangan (Disposal), dan kesehatan.

Dari ulasan tersebut membuktikan bahwa Indonesia mendapat peran yang sangat penting dalam usaha Jepang mengalahkan sekutu, karena untuk memenangkan sebuah peperangan, semua sangat bergantung pada ketersediaan logistik, dan Indonesia dijadikan pemasok utama untuk kebutuhan beras dalam bidang logistik konsumsi.

#### a. Rencana Penguasaan

Tujuan utama penguasaan pemerintah Jepang terhadap Asia Tenggara adalah untuk menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Dalam rencananya, daerah selatan dibagi atas dua wilayah, yakni wilayah A dan wilayah B<sup>21</sup>. wilayah A adalah koloni Inggris, Belanda dan Amerika Serikat, yaitu Malaya, Kalimantan utara, Hindia Belanda dan Filipina. Wilayah B meliputi beberapa beberapa koloni Perancis di

<sup>16</sup> Rickleft, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 297

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 298

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 299-300

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 301

<sup>20</sup> Suryohadiprojo, *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara Yang Modern dan Efektif*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 189

<sup>21</sup> Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta : Balai Pustaka, 1977) hlm. 142

daratan Asia Tenggara, yakni Vietnam, Laos, Kamboja. Khususnya di wilayah A, Jepang tidak semata-mata bertujuan menguasai wilayah sumber ini, tetapi juga sebagai usaha untuk memotong garis perbekalan musuhnya yang bersumber dari wilayah ini. Telah diperkirakan bahwa perang akan berlangsung lama, penguasaan wilayah yang kaya akan bahan mentah sangat meringankan beban yang dipikul oleh Jepang. Demikianlah rencana Jepang yang akan dilaksanakan dalam dua tahap<sup>22</sup>. Tahap pertama merupakan tahap penguasaan dan tahap kedua merupakan rencana untuk jangka panjang, yakni menyusun kembali struktur ekonomi di wilayah tersebut di dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan-bahan untuk perang. Struktur ekonomi yang direncanakan terdiri dari wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, yang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Demi menjaga keamanan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah Jepang meningkatkan keamanan militer di wilayah kekuasaannya dan mengambil alih semua bidang kegiatan dan pengawasan ekonomi. Beberapa peraturan yang bersifat kontrol terhadap kegiatan ekonomi dikeluarkan.

Dalam hal keperluan logistik, pemerintah Jepang memanfaatkan wilayah kabupaten Indramayu sebagai pemasok beras terbesar di Jawa. Bukan tanpa alasan pemerintah Jepang mengeksploitasi wilayah ini untuk dijadikan sumber logistik perang. Wilayah Indramayu terkenal dengan tanahnya yang subur dan memiliki iklim yang sangat cocok untuk pertanian, tidak hanya itu saja, 55% wilayah Indramayu adalah ladang persawahan pada jaman Jepang. Indramayu juga mendapat julukan gudang beras Jawa bersama dengan daerah Kerawang-Bekasi (dahulu Jakarta *Shu*) dan daerah Jember-Banyuwangi (dahulu Besuki *Shu*) dengan luas seluruh kabupaten mencapai 203.652 ha, dan 113.232 ha<sup>23</sup>.

Pada masa akhir Perang, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan politik Ekonomi "Mencukupi kebutuhan sendiri" atau *Genchi Jikatshu* yang diterapkan di wilayah kedudukannya, termasuk Indonesia. Karena keadaan transportasi laut yang saat itu tidak aman, sehingga menyulitkan angkutan yang dikirim ke

Asia tenggara, Pemerintah Jepang memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berswasembada di wilayah pendudukannya. Hal inilah yang memicu adanya kewajiban mengumpulkan bahan pangan, hasil perkebunan, dan penjarahan surplus pertanian rakyat. Kebutuhan hidup yang semakin langka menambah penderitaan rakyat yang dipaksa menyerahkan harta benda yang berguna untuk kebutuhan perang tidak terkecuali kebutuhan sandang.

Dengan adanya kebijakan penyerahan padi pemerintah military Jepang berusaha menyediakan cadangan beras bagi pasukannya sejak 1943, guna mempersiapkan diri apabila ada kemungkinan serangan dari selatan, nampaknya para tentara sipil ini mengumpulkan bahan pangan dalam jumlah yang melebihi batas. Para petani diminta menjual padinya kepada militer dengan kuota yang banyak dan harga yang murah, hal ini lebih tepatnya disebut dengan penyitaan. Menurut perhitungan kasar, kuota permintaan padi seluruhnya mencapai 38% dari produksi padi di Jawa pada tahun 1944 (lihat tabel)

Tabel I. Kebutuhan beras untuk Jepang dan pendukungnya di Jawa

Golongan	Jumlah (ton)
Cadangan untuk militer	17.000
Angkatan Darat Divisi Ke-16 (Tentara Pendudukan di Jawa)	363.000
Sumbangan untuk markas besar (Tentara Jepang di Singapura)	17.000
Kebutuhan Semi Militer	4.000
Jumlah	1.472.000

Sumber : *Miyamoto, Jawa*, Tokyo, 1973, diambil dari Aman, hlm.42

b. Usaha mobilisasi

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah baik yang menyangkut masalah pemerintahan/politik maupun ekonomi, hal ini disebabkan karena pemerintahan Indonesia saat itu hampir seluruhnya diambil alih oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Kurasawa, *Pendudukan Jepang dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Yayasan Obor, 1988), hlm. 89

mulai mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk kepentingannya sendiri, salah satunya adalah masyarakat diwajibkan untuk ikut berlatih kemiliteran serta semua kegiatan para pemuda dilarang kecuali yang ditentukan oleh Jepang. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang juga mengeluarkan undang-undang nomor 3 tanggal 20 Maret 1942<sup>24</sup>, yang isinya adalah sebagai berikut:

“Dilarang segala macam perbincangan, pergerakan dan anjuran propaganda perihal peraturan dan susunan negara”. Undang2 ini diberi penjelasan antara lain sebagai berikut, maksud undang-undang itu ialah supaya rakyat umum tinggal tetap dan tenang hatinya dan tidak berkobar-kobar kepada harapan yang bukan-bukan. Maka dari itu janganlah merasa kecewa atau khawatir karena aturan yang baru ini. Peraturan ini hanya buat sementara waktu saja untuk mencegah kekalutan dan kekeruhan dalam udara politik. Jepang juga berharap bahwa atas kemenangannya terhadap sekutu dapat menjadi tanjakan awal pemerintah Jepang menjalin kerjasama dengan rakyat Indonesia. Dikatakan bahwa pemerintah Jepang tidak ada mkasud untuk memperbudak rakyat Indonesia, namun diharapkan rakyat Indonesia mampu bekerjasama membantu pemerintah Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang menekankan bahwa tujuan kedatangannya ke Indonesia adalah sebagai saudara tua, bukan sebagai penjajah yang memperbudak rakyat seperti bangsa-bangsa yang sebelumnya.

Berkenaan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, pemerintah berusaha untuk menekan segala bentuk kegiatan yang dirasa dapat menjadi ancaman untuk pemerintah Jepang atas wilayah Indonesia. Dengan peraturan itu pula lah pemerintah Jepang membujuk masyarakat Indonesia agar mau bersedia membantu pemerintah Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya dengan segenap tenaga dan pikirannya. Tidak berhenti disitu saja, pemerintah Jepang juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang semuanya demi kepentingan pemerintah Jepang sendiri, salah satu satunya adalah kebijaka wajib serah

padi. Kebijakan ini agaknya sangat menyengsarakan petani karena dalam pelaksanaan kebijakan ini, seluruh kegiatan dimaksudkan untuk kepentingan pemerintah Jepang. Dalam usahanya untuk mensukseskan kebijakan wajib serah padi ini, pemerintahan juga melakukan berbagai upaya untuk menambah produksi beras, yang sebelumnya pada masa pendudukan Belanda, produksi beras di Jawa masih dirasa kurang maksimal. Segala upaya dilakukan termasuk penelitian, pendidikan, perluasan lahan pertanian, pelatihan dan propaganda dilakukan untuk memaksimalkan hasil produksi padi.

## B. Pendidikan dan Propaganda

Dalam usahanya untuk memaksimalkan produksi padi untuk logistik perang, pemerintah Jepang melakukan banyak penelitian guna menambah hasil produksi padi. Pemerintah Jepang mulai berusaha untuk memberikan pelatihan, pendidikan dan informasi mengenai teknik penanaman padi, ini dikarenakan pada masa penjajahan Belanda, penanaman padi masih dilakukan secara primitif. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang juga mulai merancang program-program yang mendorong semangat kerja pertanian. Bahkan pemerintah Jepang tidak enggan untuk menggunakan media propaganda demi menyebarkan semangat kepada petani agar mengerti apa maksud dan tujuan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Jepang juga mengirim beberapa orang ahli dan insinyur ke Jawa guna melakukan penenlitan terkait pemaksimalan produksi padi.

### a. Pelatihan

Langkah pertama yang diambil pemerintah Jepang untuk memaksimalkan produksi padi ialah melakukan pendidikan serta penyebarluasan informasi mengenai pertanian kepada para petani. Para insinyur dari Jepang yang di bawa ke Jawa ini lah yang ditugaskan untuk mendidik dan memberi kursus latihan berjangka pendek kepada para petani terkait dengan penanaman padi. Tidak hanya itu, Jepang juga mendirikan sekitar tujuh sekolah pertanian diseluruh Jawa dengan diisi oleh 690 siswa yang terdaftar selama masa pendudukan Jepang<sup>25</sup>.

<sup>24</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat sejarah dan nilai tradisional proyek inventarisasidan dokumentasi kebudayaan daerah 1983-1984.1984. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Timur(1945-1949)*.

<sup>25</sup> Kurasawa, *Kuasa Jepang di Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015) hlm. 17

Beberapa diantaranya adalah pegawai pemerintahan yang dikirim untuk memperoleh pendidikan tambahan. Selain itu, pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah *Nomin dojo*, yakni suatu bangunan seperti asrama yang dikelilingi oleh lading pertanian. Didalam *Nomin dojo* tersebut para siswa pelatihan berlatih dan menginap untuk beberapa periode serta mempraktekan langsung materi yang sudah diajarkan diladang sekitar asrama. *Nomin dojo* didirikan diberbagai wilayah di Jawa yang masing-masing memiliki kurikulum, peraturan sendiri, dimana di tiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda. Misalnya di Anjatan, Indramayu terdapat *Nomin dojo* yang hanya merekrut 60 siswa dan dan mengikuti pelatihan selama 4 bulan.<sup>26</sup>

Latar belakang pengajar di *Nomin dojo* beraneka macam. Disamping ada pejabat dan insinyur pertanian, juga terdapat orang Jepang yang bekerja pada perusahaan Jepang seperti Mitsubishi dan Mitsui. Dalam beberapa kasus, pengajar tidak mengajar hanya di satu tempat saja. Materi yang diajarkan berupa kajian sosial, latihan pertanian, dan pembukaan hutan. Siswa yang dipilih untuk mengikuti pelatihan di *Nomin dojo* adalah sekurang-kurangnya dua atau tiga tahun sekolah dasar. Waryani, salah seorang peserta pelatihan adalah anak dari sekretaris desa yang berasal dari Anjatan, Indramayu. Ketika dia dipilih untuk ikut pelatihan, dia masih berusia 16 tahun dan baru menamatkan sekolah dasar.

Selain *Nomin dojo*, juga terdapat *Shidojin*. Berbeda dengan *Nomin dojo*, *Shidojin* adalah sebuah jabatan yang diciptakan oleh pemerintah Jepang yang berguna untuk memberikan segala macam saran, perintah, dan informasi kepada petani. Seorang *Shidojin* yang memimpin sebuah desa atau kecamatan disebut *Son Shidojin* dan *Gun Shidojin*. Pada jenjang yang lebih rendah ada yang disebut “Mantri pertanian” atau “Mandor pertanian”. Karena banyaknya *Shidojin* yang dibutuhkan, tidak semua *Shidojin* berasal dari orang yang ahli dalam pertanian. Dalam beberapa kasus, pemerintah Jepang melatih beberapa orang bertangan dingin mengenai pertanian untuk kemudian disebar di beberapa wilayah di Jawa di dijadikan *Shidojin*. Tugas seorang *Shidojin* adalah mengajari

sekaligus memantau kegiatan pertanian. *Shidojin* sesekali berkeliling di wilayahnya dan memerintah para petani seperti menanam padi, menyiangi, membuat kompos, dan sebagainya.

Terdapat tiga jenis *Shidojin* tergantung bidang yang dipegang, yakni ada *Shidojin* yang bertanggung jawab atas pertanian, *Shidojin* yang bertanggung jawab di bidang penanaman kapas yang biasa mendapat julukan *Shidojin* kapas, kemudian *Shidojin* yang bertanggung jawab atas tanaman jarak atau biasa disebut dengan *Shidojin* jarak. Semua *Shidojin* ini mempertanggung jawabkan tugasnya dibawah pengawasan kantor pertanian didaerah masing-masing dengan gaji sebanyak F.5.<sup>27</sup>

#### b. Sekolah Kejuruan Pertanian

Terdapat sekolah pertanian dengan tingkat yang lebih tinggi yang disebut *Nogyo Senmon Gakko* atau sekolah pertanian menengah tinggi. Tidak berbeda dengan sekolah pada umumnya, sekolah ini melakukan pembelajaran di kelas dan praktek lapangan. Materi pelajaran yang pertama mencakup berbagai mata pelajaran sebagai berikut<sup>28</sup>, yang pertama adalah politik pertanian dalam pemerintahan tentara Jepang, kemudian yang kedua adalah mengenai penjagaan dan pemberantasan penyakit tumbuhan, dalam hal ini kajian materinya juga mengenai pembasmian hama seperti tikus dan pencegahan kerusakan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, materinya adalah mengenai penanaman sayuran. Tidak hanya menanam padi, pada pelatihan ini juga diajari untuk meningkatkan hasil sayuran dan perikanan. Materi selanjutnya diajari mengenai pelajaran bakti. Pelajaran bakti ini bertujuan untuk mempengaruhi para petani akan pentingnya kebijakan wajib serah padi. Kemudian juga ada materi mengenai pembuatan pupuk, pengenalan padi jenis baru (*Hoorai*), peternakan, perlombaan padi, dan sebagainya. Dalam pemberian materi pun pemerintah Jepang menyisipkan propagandanya tentang arti perang Asia Timur Raya dan bersedia bekerjasama dalam membantu pemerintah Jepang. Setelah mendapatkan pelatihan, peserta pelatihan diminta menyebarluaskan ilmu nya kepada para petani yang ada di desa dan dengan adanya program pelatihan ini diharapkan mampu menambah

<sup>26</sup> Wawancara yang dilakukan oleh Aiko dengan Waryani. Waryani adalah salah satu siswa *Nomin dojo*. Ia juga masih menyimpan selembur ijazah yang diberikan kepadanya ketika akhir pelatihan

<sup>27</sup> *Loc.cit.*

<sup>28</sup> *Op.cit.*, hlm. 18

produksi padi demi menunjang kebutuhan perang

Dari isi materi yang akan disampaikan pada pelatihan pertanian tersebut jelas sekali bahwa pemerintah Jepang memahami mengenai kesuburan tanah yang ada di Jawa dan bermaksud untuk mengeksploitasinya secara maksimal baik dari segi perikanan maupun pertanian. Pemerintah Jepang secara gencar melakukan berbagai upaya untuk membuat masyarakat terperdaya dan mau membantu kepentingan pemerintah Jepang. Hal ini juga terlihat dari adanya materi “Semangat Nippon” dan “Arti Penting Perang Asia Timur Raya”. Inilah ciri khas dari pelatihan yang diberikan pemerintah Jepang. Selain memberikan materi pembelajaran mengenai pertanian, pemerintah Jepang juga bermaksud memasukkan propaganda politik dan ideologinya. Pemateri dalam pelatihan ini diisi oleh orang Jepang, bisa dari administrator maupun insinyur pertanian, juga ada pejabat tinggi Indonesia pada Departemen Perindustrian *Gunseikanbu*. Buku-buku pelajarannya diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Pada proses pembelajarannya, untuk materi ceramah dilakukan dikedung *Nogyo Senmon Gakko*, sedangkan latihan praktik lapangan dilakukan di Stasiun percobaan<sup>29</sup>.

#### c. Usaha Melipatgandakan Hasil

Dengan memanfaatkan segala media yang ada, pemerintah Jepang berusaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya untuk meningkatkan hasil padi, termasuk mengeluarkan slogan “Melipatgandakan hasil”. Segala media propaganda seperti Koran, majalah, teater, pidato, *Kamishibai* (sejenis pertunjukan cerita bergambar) dan sebagainya, semua dimanfaatkan sebagai media propaganda pemerintah Jepang untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa mereka dengan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan. Para petani di beri pesan melalui pengeras suara radio yang ada di tiang-tiang desa. Tujuan propaganda ini adalah untuk meningkatkan semangat petani dalam mengolah sawah. Bahkan pada setiap majalah seperti “*Djawa Baroe*” gencar sekali pemerintah menampilkan gambar mengenai semangat para petani dalam mengolah sawah. Bahkan pernah diterbitkan majalah “*Djawa Baroe*” dengan sampul utamanya bergambar

petani yang sedang mencangkul sawah. Berbagai siasat Jepang dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi padi, seperti pemberian hadiah kepada perorangan, perlombaan produksi terbesar diselenggarakan di kawedanan atau didesa. Hadiahnya berupa barang-barang komoditas langka dan sandang pangan. Hal ini juga pernah diberitakan dalam surat kabar *Tjahaja*, diumumkan bahwa terdapat hadiah dalam usaha mengumpulkan padi. Hadiah tersebut dimaksudkan sebagai penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu usaha-usaha penyerahan padi. Berikut adalah hadiah yang janjikan oleh pemerintah Jepang<sup>30</sup> :

1. Desa yang telah memenuhi kewajibannya 100% dari penetapan setahun sampai pada akhir bulan ke tujuh tahun 2605.
  - a. *Kucho* dan pemimpin panitia mendapat hadiah berupa sehelai sarung dan dua meter kain.
  - b. 10 orang dari panitia yang bekerja giat diberi kesempatan untuk membeli sehelai sarung dan dua meter kain
  - c. Anggota panitia yang lain diberi rokok sebanyak 200 batang rokok tiap orangnya.
2. Desa yang memenuhi kewajibannya 100% dari penetapan setahun sampai akhir bulan 8 tahun 2605 mendapat bagian :
  - a. *Kucho* dan pemimpin panita mendapatkan sehelai sarung secara cuma-cuma.
  - b. 10 orang panitia diberi kesempatan membeli dua meter kain.
  - c. Anggota lainnya diberi rokok sebanyak 100 batang tiap orangnya.

Penduduk, yaitu petani di desa yang telah memenuhi kewajibannya dari penetapan setahun sampai akhir bulan 8 tahun 2605 diberi secara hadiah dua meter kain.

#### C. Pungutan Padi di Indramayu

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>30</sup> *Tjahaja*, Djoem'at 20 *Sitigatu* 2605

Sebelumnya sudah penulis uraikan mengenai alasan penulis memilih kabupaten Indramayu sebagai lokasi penelitian. Untuk sedikit mengingatkan kembali, Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang dianggap sebagai gudang beras pada masa pendudukan Jepang. Indramayu mensuplay beras paling banyak dibanding dengan wilayah lain di Indramayu. Hal ini dikarenakan 55% wilayah Indramayu adalah persawahan.

a. Dasar-dasar Pungutan Padi

Tepatnya pada bulan Agustus 1942 *Gunseikanbu* (Pemerintah Militer) melakukan pungutan padi pertama secara sistematis. Antara bulan Agustus 1942 sampai dengan April 1943, akhirnya dikeluarkan dasar-dasar pokok pungutan padi sebagai berikut<sup>31</sup> :

1. Seluruh padi yang dihasilkan oleh para petani sepenuhnya berada dibawah kekuasaan pemerintah, serta hanya pemerintah yang diizinkan melakukan pungutan dan penyaluran padi. Dalam hal ini pemerintah membentuk Badan Pengelola Pangan yang disebut *Syokuryo Kanri Zimusyō* (SKZ, Kantor Pengelolaan Pangan) dibawah Departemen Ekonomi. Wewenang dari badan ini adalah menguasai seluruh proses pungutan, penyaluran padi serta menentukan jumlah padi yang akan dibeli oleh pemerintah. Badan ini pula yang menentukan harga padi secara resmi.
2. Petani diwajibkan menjual hasil padinya sesuai dengan kuota dan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Padi tersebut harus diserahkan kepada tempat penggilingan padi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apabila petani masih memiliki surplus kelebihan padi setelah dikumpulkan, maka petani wajib menjualnya kepada penggilingan padi tersebut, serta tidak diijinkan menjualnya kepada tengkulak

Kebijakan baru mengenai penyerahan padi dimuat diberbagai media masa untuk menyebarluaskan keputusan pemerintah ini kepada

seluruh petani di Indonesia khususnya di Jawa. Salah satu yang memuat berita mengenai kebijakan tersebut adalah surat kabar *Tjahaja* yang terbit pada 1943. Dalam surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pengumpulan padi ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan bagi rakyat jawa serta untuk meneguhkan kedudukan perekonomian penduduk. Gerakan penyerahan padi ini menurut kabar tersebut dilakukan sampai kira-kira Bulan 8 tahun 2605 dibawah pimpinan Jawa *Hooko Kai* serta kantor pemerintah juga akan ikut menyempurnakan gerakan ini. Dalam hal ini, *Sendenbu* bertugas membuat poster, film, *wayang beber* dan cara lain yang berhubungan media penyiaran. Masih dalam surat kabar yang sama, pemerintah menganjurkan beberapa hal berkaitan dengan gerakan penyerahan padi, diantaranya<sup>32</sup> :

1. Memperdalam informasi dan maksud dari kebijakan penyerahan padi.
2. Membangkitkan kerelaan petani menjual padi kepada pemerintah, untuk kemakmuran bersama dalam masyarakat.
3. Menyempurnakan usaha pengangkutan padi.
4. Menyempurnakan urusan-urusan antara kaum petani dengan perusahaan penggilingan padi.
5. Menggiatkan usaha menambah hasil padi untuk memperbanyak jumlah penyerahan padi.
6. Diberitahukan kepada para konsumen di kota bahwa walaupun sedikit sekali pembagian beras harus mengucapkan rasa terima kasih atas kegiatan kaum petani serta bersedia mematuhi peraturan-peraturan mengenai larangan menjual atau membeli beras dengan harga gelap, sebab pada hakekatnya perbuatan tersebut menguntungkan pihak musuh. Semangat gotong royong sangat diperlukan dan dikobarkan dalam

<sup>31</sup> Kurasawa, *Pendudukan Jepang dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), hlm. 87-88

<sup>32</sup> *Tjahaja*, Selasa 20 Rokugatu 2605

mencapai kemenangan akhir dan Indonesia merdeka.

Kemudian dalam kolom surat kabar yang sama dijelaskan pula mengenai Dasar Gerakan Penyerahan Padi oleh Jawa *Hookoo Kai*. Pada 20 April 1943 Djawa *Hookoo kai* mengumumkan berbagai hal dalam kaitannya dengan Gerakan Penyerahan Padi, yakni<sup>33</sup> :

1. Pada Jawa *Hookoo Kai*, dari Tyuuoo Honbu sampai Ku, diadakan panitia penyerahan padi, selanjutnya disebut Panitia. Panitia tersusun dari *Hookoo Kaityoo* dan lain-lainnya (wakil-wakil *Suisintai*, *Huzin Kai*, *Seimaigyoo Kumiai* = *Kumimai* penggilingan beras, pegawai-pegawai negeri yang bersangkutan dan badan-badan lain) berusaha menggerakkan penyerahan padi kepada pemerintah supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya.
  - Panitia mengerjakan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Memberi pengertian kepada rakyat tentang maksud penyerahan padi.
    - b. Mempertebal kepercayaan kepada pemerintah
    - c. Mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai praktek penyerahan padi.
2. Untuk meyakinkan rakyat diambil tindakan-tindakan sebagai berikut :
  - a. Memberi penerangan sejelas-jelasnya kepada rakyat tentang maksud penyerahan padi untuk mencapai kemenangan akhir dan Indonesia merdeka, dengan mengadakan *Hookoo Kai* atau *Kondankai* di-*Syuu*, *Ken*, *Gun*, *Son* dan *Ku*.
  - b. Pengurus panitia menjalankan kewajiban masing-masing yang sesuai dengan maksud tersebut diatas dan memimpin rakyat dengan perbuatan yang baik dan nyata sehingga menjadi teladan bagi umum
3. Untuk mempertebal kepercayaan kepada pemerintah, diambil tindakan-tindakan berikut :
  - a. Panitia sedapat-dapatnya berusaha menyiapkan berdirinya koperasi pertanian di tiap desa dan sambil menunggu pengumuman dari

pemerintah mengenai peraturan koperasi tersebut.

- b. Didaerah yang belum didirikan koperasi pertanian, panitia di *Son* atau *Ku* (yang terdiri dari pengurus *Hookoo Kai*, *Suisintai*, pegawai polisi, Alim Ulama dan orang-orang yang terkemuka) berusaha memudahkan pengumpulan padi.
  - c. Wakil Jawa *Hookoo Kai* menjadi pengurus harian (*Zonin Rizi*) *Seimagyoo Kumiai* dan *Seimagyoo Kumiai Rengokai*, dan berusaha untuk menyempurnakan perhubungan antara usaha penyerahan padi dengan penggilingan
  - d. Panitia berusaha menyelenggarakan pengangkutan padi ke penggilingan beras dengan menggunakan tenaga sepenuhnya dari *Suisintai* dan badan-badan lainnya.
  - e. Dengan izin *Syo Kuryo Kanri Kyoku* (kantor urusan makanan) koperasi pertanian atau *Son/Ku Hookoo Kai* dapat menumbuk padi yang tidak bisa digiling sebab banyaknya lebih dari batas tenaga pabrik penggilingan.
  - f. Atas perintah *Syuytyoookan*, Jawa *Hookoo Kai* dapat membagikan beras pada waktu yang tepat kepada penduduk yang membutuhkan.
  - g. Wakil Jawa *Hookoo Kai* menjadi pengurus harian (*Zonin Rizi*) B.O.K (*Beikoku Orosi-syo Kumiai*) di tiap-tiap *Syuu*.
4. Untuk mengumpulkan keterangan tentang praktek penyerahan padi diambil tindakan sebagai berikut :
    - a. Panitia senantiasa mengumpulkan keterangan keadaan penyerahan padi yang diurusnya dan melaporkan dengan segera kepada panitia yang bertingkat lebih tinggi.
    - b. Dengan jalan demikian panitia dapat mengambil tindakan yang perlu terhadap daerah yang tidak mempunyai penghasilan yang baik.
  5. Pada bulan 5,6 dan 7, panitia berusaha melaksanakan maksud yang direncanakan oleh masing-masing *Syuu*.

<sup>33</sup> *Ibid.*

6. Dalam melakukan gerakan ini, panitia mengadakan perhubungan rapat dengan kantor *Syuu, Ken, Gun, Son, dan Ku*

Keadaan beras di Jawa sendiri sejak 1942 memang dirasakan mengkhawatirkan. Karena itu untuk distribusi bahan makanan ini dibentuk *Syokuryo Kanri Jimusyo*. Untuk menambah produksi direncanakan untuk menambah areal tanah. Cara menambah areal ini dengan membuka tanah baru, terutama bekas perkebunan dan memanfaatkan tanah lainnya yang belum pernah ditanami. Usaha untuk menambah produksi beras sebenarnya adalah rencana lama. Pulau Jawa dituntut untuk menghasilkan 50.000 ton beras dan 30.000 ton jagung<sup>34</sup>. Jepang juga menyelenggarakan penyuluhan bimbingan secara intensif kepada para petani melalui para penyuluh pertanian. Sesungguhnya langkah pemerintah Jepang untuk melipatgandakan hasil padi sudah tepat, namun kelemahan dalam kebijakan ini adalah terletak pada pengisi materi yang akan melakukan penyuluhan. Para pelatihnya (*Syidokan*) bukanlah dipilih orang yang benar-benar ahli dibidang pertanian, pelatih hanya mendapat pelatihan yang singkat. Produksi bahan makan juga merosot karena jumlah pemotongan hewan dan menurunnya angka kelahiran hewan yang berguna bagi pertanian.

#### D. Susunan Kebijakan Penyerahan Padi

##### a. Pembentukan organisasi

Pada awal mula kedatangannya di Jawa, pemerintah Jepang tidak langsung menerapkan kebijakannya dalam hal pungutan padi. Akan tetapi pada awalnya mereka masih meneruskan kebijakan Belanda yang sebelumnya telah lama diterapkan dimana pada kebijakan tersebut petani masih memiliki kebebasan untuk menyisihkan produksi padi mereka dan pemerintah Belanda menerapkan pasar bebas terkecuali untuk kontrol harga. Meneruskan dari kebijakan Belanda ini, untuk mendapatkan kebutuhan pangan, pemerintah Jepang harus membeli beras pada *Rist Verkoop Centrale* yang kemudian namanya diubah menjadi *Beikoku Tosei Kai* (B.T.K atau Persatuan Kontrol Beras)<sup>35</sup>. Namun pada periode Maret-Juni dimana masa

puncak musim panen berlangsung, pabrik penggilingan padi tidak berjalan dengan lancar karena kredit, yang berakibat pada tidak adanya keseimbangan antara penerimaan dan penawaran. Baru pada Agustus 1942 pemerintah Jepang mulai menanamkan bertindak dalam hal kebutuhan beras. Jepang mulai membentuk badan yang mampu mengontrol dan memobilisasi para petani untuk menyerahkan padinya. Pemerintah Jepang membentuk *Syokuryo Kanri Zimusho* (S.K.Z atau kantor pengelolaan pangan) dibentuk dibawah pemerintahan militer (*Gunseikanbu*). Dalam beberapa hal S.K.Z bisa menjadi pengganti *Voedingsmiddelenfonds* (Badan yang mengurus perihal Dana Perbaikan Makanan pada masa penjajahan Belanda). Badan ini bertanggung jawab atas pengenalan seluruh proses pembelian dan distribusi beras dibawah kontrol monopoli negara. Selain itu S.K.Z juga merupakan badan resmi yang berhak menentukan kuota beras yang dikumpulkan, harga beras serta merancang pendistribusian beras di kota. Latar belakang staf karyawan badan ini bermacam-macam, ada yang berasal dari pejabat pemerintahan, pegawai perusahaan swasta seperti Mitsubishi, dan sebagainya.

Dibawah S.K.Z terdapat *Kumiai*, yakni suatu badan yang bertanggung jawab atas seluruh penggilingan beras disetiap kerassidenan. Keanggotaannya bersifat wajib, jika ada yang tidak masuk menjadi anggota *Kumiai*, maka tempat penggilingan padi tersebut dilarang beroperasi. Sebelumnya, persekutuan penggilingan padi ini bernama *Beisho Kumiai*, namun pada September 1943 nama tersebut diubah menjadi *Seimagyo Kumiai* dimana di pulau Jawa terdapat tiga federasi yakni ada di Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, yang merupakan pengganti R.V.C atau *Beikoku Tosei Kai*, kemudian juga ada perkumpulan pedagang beras semipemerintah yang disebut *Beikoku Oroshiuri Kumiai* (Persatuan pedagang Besar Beras)<sup>36</sup>. Para pedagang ini membeli beras kepada tempat penggilingan padi yang sudah ditunjukkan pemerintah, dan

<sup>34</sup> Soeara Asia, 1 April 1944

<sup>35</sup> Kurasawa, *Kuasa Jepang di Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015), hlm. 78

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 80

menjualnya secara eceran kepada toko-toko juga atas peraturan dan kehendak pemerintah Jepang.

Dalam menyelesaikan tugasnya ini, S.K.Z tidak berjalan sesuai harapan karena memiliki banyak kendala yang salah satunya adalah kesulitannya mendapat beras karena sedikitnya cadangan yang merupakan dampak ketika pada saat terakhir masa panen pihak penggilingan padi tidak membeli beras dalam jumlah yang besar, untuk itu S.K.Z harus meminjam modal dengan jumlah yang cukup banyak kepada para penggiling padi untuk membeli padi kepada para petani dalam jumlah yang banyak.

b. Sistematisasi Pungutan Padi

Dalam pengumpulan padi, para petanilah yang datang ketempat pengumpulan padi yang telah ditetapkan. Padi tersebut ditimbang dan petani dibayar. Pada zaman pendudukan Belanda, padi dijual dengan hitungan per ikatan padi yang disebut gedeng. Namun pada zaman pendudukan Jepang dipakai satuan berat dengan kuintal sebagai unit dasar.

## PENUTUP

### a. Kesimpulan

Pemerintah Jepang memasukkan Indonesia sebagai salah satu rencana dalam strategi memenangkan perang Asia Timur Raya. Kekayaan dan kesuburan tanah Indonesia membuat pemerintah Jepang berkeinginan untuk memobilisasi dan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia guna kepentingan perang. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki tanah yang sangat subur. Dengan alasan tersebutlah pemerintah Jepang memfokuskan untuk melakukan eksploitasi dan mobilisasi dalam hal kebutuhan logistik terutama beras. Dalam usaha untuk mewujudkan usaha tersebut, Jepang melakukan banyak usaha untuk mengontrol ekonomi di tanah Jawa. Salah satunya dengan melakukan kebijakan “Wajib Serah Padi” dimana kebijakan ini sebenarnya diwajibkan diseluruh Indonesia, namun pemerintah Jepang lebih memfokuskannya di wilayah Indramayu, Jawa Barat.

Pada masa pendudukan Jepang, Indramayu mendapat sebutan “Lumbung Padi” di Jawa. Hal ini disebabkan karena wilayah ini merupakan wilayah yang menghasilkan padi terbanyak diseluruh Jawa. Pada awal pelaksanaan

kebijakan ini, produksi Padi masih dianggap rendah sehingga pemerintah Jepang mengusahakan untuk dilakukan pelatihan yang berkaitan dengan cara penanaman padi yang benar. Pada masa pendudukan Belanda, petani di Jawa masih menggunakan cara yang primitif untuk melakukan penanaman padi. Hal ini lah yang dianggap pemerintah Jepang sebagai kendala dalam usaha peningkatan produksi padi. Dalam usaha ini, pemerintah mengadakan kursus bagi para petani yang berkaitan dengan penanaman padi, mulai dari pemilihan bibit, penanaman, pembuatan pupuk, sampai masa panen. Pemateri dalam kursus pertanian ini adalah ahli pertanian yang berasal dari Jepang dan Indonesia. Dengan adanya kursus ini pemerintah Jepang berharap terdapat peningkatan dalam hal produksi padi.

Kebijakan wajib serah padi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang mewajibkan petani Indramayu untuk menyerahkan padinya sekitar 30% untuk pemerintah, 30% untuk diserahkan kepada lumbung padi sebagai cadangan padi, kemudian sisanya sekitar 40% untuk konsumsi sendiri. Namun dengan seiring berjalannya waktu, beras yang dihasilkan oleh para petani mulai semakin berkurang. Banyak sekali kendala yang dialami oleh petani dalam usaha meningkatkan produksi padi. Kendala tersebut diantaranya adalah hama, kelangkaan sapi, iklim, kekurangan tenaga kerja yang disebabkan karena sebagai besar petani diperintahkan untuk latihan wajib militer, sehingga waktunya tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan militer. Kendala lainnya yakni, buruknya infrastruktur serta kurangnya semangat kerja para petani. Penurunan hasil produksi ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru, yakni cadangan yang disimpan oleh para petani seluruhnya diambil kecuali dua ikat saja setiap satu kepala keluarga.

Kebijakan baru ini semakin membuat rakyat semakin menderita, ditambah dengan padi yang mereka jual dihargai dengan harga yang murah. Diberbagai daerah di Indramayu seperti Kaplongan, Sindang dan Loh Bener dan Bugis. Pemberontakan di desa Kaplongan adalah pemberontakan yang mengawali seluruh pemberontakan di Indramayu. Pemberontakan ini diawali ketika pemberitahuan mengenai kebijakan baru tentang wajib serah padi yang memerintah petani memberikan seluruh padi

cadangannya kepada pemerintah. Kemudian dengan terpaksa petani menyerahkan padinya kepada pemerintah dan diangkut untuk dikirim ke balai desa. Penduduk Kaplonga mayoritas beragama muslim dan taat.

Pada saat proses pengangkutan padi tersebut, kebetulan adalah hari jumat sehingga para petani meminta ijin untuk berhenti sejenak melakukan pengangkutan dan melaksanakan ibadah sholat Juma'at, namun ijin tersebut ditolak dan petani diminta untuk meneruskan kegiatan pengangkutan padi. Para petani muslim tersebut tidak menerima begitu saja dan mulai memberontak mereka lebih menolak mati karena memberontak dari pada mati kelaparan. Kemudian pemberontakan yang terjadi di Sindang dan Lohh Bener sendiri terjadi karena adanya kebijakan bahwa petani diminta menyerahkan seluruh cadangan padinya dan hanya menyisakan 25 kg. Hal ini menimbulkan kemarahan dari para petani yang pada akhirnya menculik pejabat yang bersangkutan dan diancam akan dikubur hidup-hidup jika masih melakukan pungutan padi yang sangat membebankan tersebut. Pemberontakan selanjutnya terjadi di desa Bugis. Menurut beberapa sumber, pemberontakan yang terjadi di desa Bugis ini merupakan sisa-sisa dari pemberontakan yang terjadi pernah terjadi di Kaplongan. Hal ini disebabkan karena beberapa petani dari Kaplongan yang melakukan pemberontakan berhasil kabur dan bersembunyi di desa Bugis.

Jika kita tarik satu garis lurus dari ketiga pemberontakan tersebut, kita dapat menemukan beberapa hal menarik sebagai berikut. Pertama, pemberontakan para petani ini dilakukan dengan cara yang spontan dan tidak terorganisir, bersifat non politis dan tidak berencana. Dalam melakukan pemberontakan, tidak ada pemimpin yang jelas serta tidak ada ideologi tertentu. Kedua, penyebab dari pemberontakan ini adalah adanya penolakan mengenai kebijakan wajib serah padi. Pada awal munculnya kebijakan wajib serah padi tidak ada petani yang berani melakukan pemberontakan, namun setelah permintaan kuota padi semakin meningkat, maka petani pun berani melakukan pemberontakan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup. Ketiga, pemberontakan diprakarsai oleh para petani kaya. Hal ini terbukti ketika terjadi penangkapan, tujuh dari 13 petani yang ditahan merupakan para petani kaya. Kelima,

sasaran utama pemberontakan petani adalah para Pamong Desa dan Pangreh rendahan selalu bersikap semena-mena dalam melakukan pungutan padi dengan alasan atas perintah dari pimpinan, yakni pemerintah Jepang. Namun di lihat dari sisi positifnya, dengan adanya pelatihan penanaman padi oleh pemerintah Jepang, rakyat Indonesia menjadi lebih modern serta mampu menciptakan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kegiatan pertanian.

#### A. Saran

Skripsi dengan judul "Politik Padi Pada Masa Pendudukan Jepang di Indramayu Tahun 1942-1944" merupakan salah satu dari sedikit penelitian yang berkaitan dengan keadaan ekonomi di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Sulitnya mendapatkan sumber-sumber primer mengenai peninggalan masa pendudukan Jepang merupakan kendala yang cukup besar dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itulah penulis berharap untuk peneliti-peneliti selanjutnya agar bersedia meneruskan penelitian ini guna mendapatkan pengetahuan yang luas yang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia yang terjadi selama 3,5 tahun, karena pada dasarnya tidak hanya dampak negatif saja yang ditimbulkan oleh Jepang, namun juga terdapat beberapa hal yang bermanfaat positif bagi kehidupan rakyat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber Arsip

- Foto Arsip Nasional pada masa pendudukan Jepang 1942 -1945
- Majalah Djawa Baroe yang terbit tahun 1942-1944
- Majalah Pandji Poestaka 1943
- Surat kabar seperti:
  - Kedaultan Rakjat, Selasa Pon 27 November 1945
  - Soeara Asia, 17 April 1944
  - Tjahaya, Djoem'at 20 Sitigatu 2605
  - Tjahaya, Senin 23 Sigatu 2605
  - Tjahaya, Djoem'at 29 Rokugatu
  - Tjahaya, Selasa 20 Rokugatu 2605
  - Tjahaya, Saptoe 28 Sitigatu 2605
  - Tjahaya, Rebo Legi 22 Agustus 2605
  - Tjahaya, Selasa 24 Sigatu 2605
  - Tjahaya, Selasa 20 Sangatu 2605

## Sumber sekunder

- Capt.R.P.Suyono.2004.*Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial*.Jakarta:Grasindo
- Departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat sejarah dan nilai tradisional proyek inventarisasidan dokumentasi kebudayaan daerah 1983-1984.1984. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Timur(1945-1949.)*
- Geertz,Clifford.1983.*Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*.Jakarta: Bhratara karya aksara
- Gilbert J,Garragham.1948.*A Guide to Historical Method*.New York:Fordham university press
- Goto,ken'Ichi.1998.*Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Herkusumo,Arniati Prasedyawati.1982.*Chuo Sangin :Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*.Jakarta:PT Rosda Jayaputra
- Jeffri Rieski Triyanto (2014) "Mobilisasi bangsa Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang Untuk Kepentingan Perang Asia Timur Raya Tahun 1942-1945"
- Kasdi,Aminuddin,2011.*Memahami Sejarah*.Surabaya: UNESA University press
- Kartodirdjo,Sartono. Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, ed.1977.*Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6*.Jakarta:Balai Pustaka
- Kurasawa,Aiko.1993.*Seri Pengkajian Kebudayaan Jepang, Mobilisasi dan Kontrol:Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*.Jakarta:Gramedia.
- Kurasawa,Aiko.1988.*Pendudukan Jepang dan Perubahan Sosial:Penyerahan Padi Secara Paksa dan Pemberontakan Petani di Indramayu*.Jakarta:Yayasan Obor
- Kurosawa,Aiko.2015.*Kuasa Jepang di Jawa:Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*.Depok:Komunitas Bambu.
- Kasenda,Peter.2015.*Soekarno dibawah Bendera Jepang (1942-1945)*.Jakarta:Kompas
- KS,Tugiyono.Kutoyo,Sutrisno.1985.*Atlas dan Lukisan Sejarah Nasional Indonesia*.Jakarta:CV Baru.
- Mulyatari,Dwi.2000."*Buku Putih*" *Masa Pendudukan Jepang*.Jakarta: Universitas Indonesia (Jurnal Online:Vol.2,No.1)
- Nagazumi,Akira.1988.*Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*.Jakarta:Yayasan Obor.
- Nagazumi,Akira.1986. *Indonesia dalam kajian sarjana Jepang : perubahan sosial-ekonomi abad XIX & XX dan berbagai aspek nasionalisme Indonesia*.Jakarta:Yayasan Obor
- Nasution, Abdul Haris.1977.*Sekitar Perang Kemerdekaan Vol I*.Bandung:Angkasa.
- Notosusanto, Nugroho.1976.*Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia,Sejarah Nasional Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka
- Notosusanto,Nugroho. 1977.*Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Nugroho Adi,P.2010.Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Masyarakat Magelang 1942-1945.(Jurnal Online:Paramita Vol.20,No.2)
- Ibrahim,Julianto.2004.Eksploitasi Ekonomi Pendudukan Jepang Di Surakarta (1942-1945).Universitas Gadjah Mada (Jurnal Online:Vol 16,No.1,hl:35-49)
- Pringgodigdo,Prof.Mr.A.G. tatanegara di dJawa pada waktu pendudukan Djepang dari bulan maret-bulan Desember 1942. 1952. Yoyakart:UGM.
- R.Moh. Ali.1961.*Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*.Djakarta:Bhratara
- Ricklef,M.C.2007.*Sejarah Indonesia Modern*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Susanto,Budi.dkk.1994.*Politik Penguasa dan Siasat Pemoeda Nasionalisme dan Pendudukan Jepang di Indonesia*.Yogyakarta : Kanisius
- Suryohadiprojo,Sayidiman . 2005 . *Si Vis Pacem Para Bellum :Membangun Pertahanan Negara Yang Modern dan Efektif* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suryanegara,Ahmad Mansur. 2010.*Api Sejarah 2*.Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia.2009.*Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta:Balai pustaka